

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Banyak negara berkembang menghadapi masalah kemiskinan sebagai salah satu tantangan pembangunan yang kompleks dan berbagai macam. Agenda pembangunan global, termasuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama. Tingkat kemiskinan sebuah negara dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan jumlah penduduk. Dalam Rahmawati & Sebayang (2023) dipaparkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 menempatkan kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun sebagai tujuan pertama dari 17 tujuan yang akan dicapai hingga 2030. Salah satu transformasi dalam SDGs adalah “*Leave no one behind*” yaitu mengupayakan pergeseran dari sebelumnya mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem menjadi mengakhiri kemiskinan ekstrem. Konsekuensi dari transformasi tersebut menuntun para pemangku kebijakan untuk mendesain tujuan pembangunan yang berfokus pada bagaimana menjangkau para kelompok marjinal.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Putra et al. (2022) kemiskinan merupakan suatu bentuk ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari sisi ekonomi. Penduduk termasuk dalam kategori miskin jika mempunyai pengeluaran per kapita per bulannya tidak lebih dari garis kemiskinan. Secara luas, kemiskinan adalah keterbatasan dan ketidaknyamanan dalam memenuhi kebutuhan

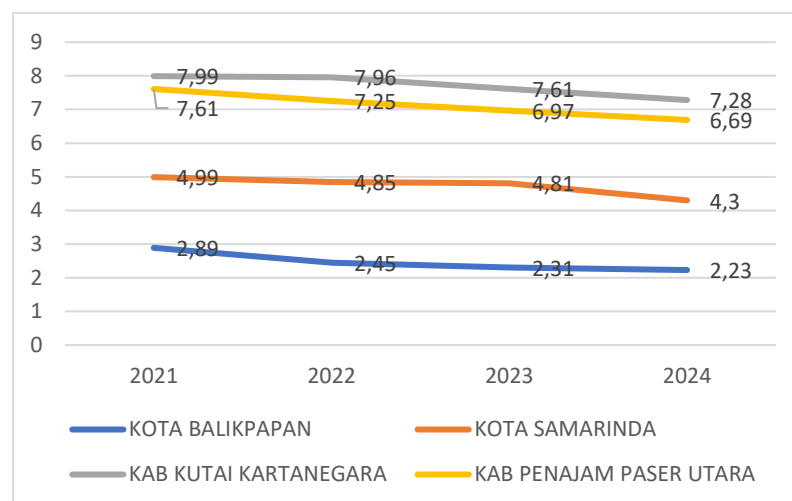
untuk bertahan hidup. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia, yang mengakibatkan penurunan produktivitas dan pendapatan.

Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena penghasilan yang rendah tidak dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, nutrisi dengan baik, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia dari aspek fisik dan juga intelektual (Lowing et al., 2021).

Peristiwa pemindahan ibu kota negara sudah banyak dilakukan oleh beberapa negara dengan alasan yang beragam. Indonesia juga melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan berbagai pertimbangan antara lain faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan. Selain itu juga, pemindahan ibu kota mempertimbangkan karena ibu kota sebelumnya terdapat kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki (Mazda, 2022). Pembangunan IKN di kawasan timur tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur yang letaknya di tengah Indonesia harapannya bisa mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi dan pembangunan.

Wilayah *Hinterland* IKN mencakup beberapa kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur antara lain Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada Gambar 1.1 menunjukkan adanya variasi tingkat kemiskinan dari kabupaten dan kota

tersebut, kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat pembangunan IKN berpotensi menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar antara pusat kota dengan wilayah sekitarnya jika tidak dikelola dengan tepat. Kemiskinan merupakan masalah yang penting dan menjadi persoalan rumit yang sedang dihadapi oleh seluruh negara-negara di dunia, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kemiskinan sehingga menjadi masalah yang sulit untuk diatasi (Lavenia et al. 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

**Gambar 1. 1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Wilayah *Hinterland* IKN**

**Tahun 2021-2024 (persen)**

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat adanya perbedaan tingkat kemiskinan di wilayah *Hinterland* IKN. Keempat kabupaten/kota tersebut menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan yang konsisten selama tahun 2021-2024. Kota Balikpapan memiliki tingkat kemiskinan terendah dan penurunan sebesar 0,66% dari 2,89% menjadi 2,23%, diikuti Kota Samarinda yang turun 0,69% dari 4,99% menjadi 4,30%. Kabupaten Kutai Kartanegara, meski memiliki angka kemiskinan

tertinggi, juga mengalami penurunan sebesar 0,71% dari 7,99% menjadi 7,28%. Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni 0,92% dari 7,61% menjadi 6,69%. Faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat dan laju penurunan kemiskinan antar daerah antara lain pertumbuhan ekonomi lokal, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan kepadatan penduduk (Ayudia et al. 2024). Daerah dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, akses pendidikan yang lebih baik dan tingkat pengangguran yang lebih rendah cenderung memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah dan penurunan yang lebih signifikan. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di keempat wilayah *Hinterland* IKN tersebut mengalami penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Namun, fenomena menarik yang perlu dikaji lebih mendalam adalah adanya disparitas yang cukup signifikan dalam tingkat kemiskinan antara kabupaten dan kota. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tingkat kemiskinan yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, meskipun keempat wilayah tersebut sama-sama mengalami penurunan kemiskinan.

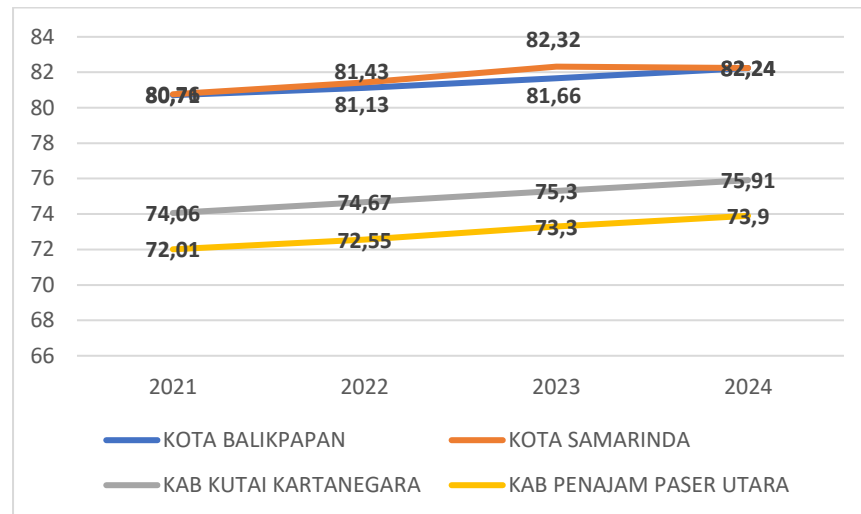
Suatu wilayah bisa melakukan pengembangan produksi jasa serta barang yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja di wilayah tersebut melalui investasi. Penyerapan angkatan kerja oleh lapangan kerja dapat menambah pendapatan masyarakat. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dapat melakukan akses sendiri sarana kesehatan dan pendidikan. Sebab itu, adanya peningkatan investasi dapat menurunkan kemiskinan (Putri, 2024). Investasi dan kemiskinan merupakan ukuran penting keberhasilan pembangunan suatu bangsa.

Negara bertujuan untuk memaksimalkan investasi untuk mengentaskan kemiskinan guna mencapai pembangunan. Para investor menggunakan investasi tersebut untuk mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Pratama et al., 2022). Daya tarik IKN sebagai salah satu faktor utama adanya investasi besar-besar. Secara umum pertumbuhan investasi terjadi tidak hanya untuk di lingkungan IKN saja, melainkan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang terpilih untuk IKN memperoleh pengaruh kuat terhadap tumbuhnya investasi. sektor-sektor yang diminati oleh investor dalam laporan terbagi menjadi sektor primer, sekunder dan tersier. Di antara sektor primer yang banyak diminat adalah tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, kehutanan dan pertambangan. Sedangkan pada sektor sekunder yang banyak diminati oleh para investor di antaranya industri makanan, industri kayu, industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi; industri karet, barang dari karet dan plastik industri mineral non logam, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam industri kendaraan bermotor dan transportasi, dan industri lainnya. Kemudian seluruh sektor tersier banyak diminati oleh investor seperti listrik, gas dan air, konstruksi perdagangan dan reparasi transportasi, gudang dan komunikasi perumahan, kawasan industri dan perkantoran dan jasa lainnya (Putri et al., 2024).

Upah rendah yang diterima oleh masyarakat berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat di suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya

manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sering dikaitkan oleh ketrampilan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat miskin akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun temurun apabila faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak diperhatikan oleh pemerintah (Sari, 2021).

Perpindahan ibu kota negara membawa tantangan besar bagi kota-kota di sekitarnya. Dampaknya terhadap kemiskinan tidak dapat diabaikan meskipun ada potensi pertumbuhan ekonomi. Dampak dari pertumbuhan penduduk yang pesat dapat memperburuk kemiskinan jika tidak ada rencana mitigasi yang tepat meskipun secara ekonomi ada potensi pertumbuhan karena aktivitas pembangunan dan investasi meningkat. Paradigma pembangunan saat ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi harus diukur dengan pembangunan manusia, yang diukur dengan tingkat kualitas hidup manusia setiap negara. Indeks Pembangunan Manusia adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia, yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli ekonomi. Peningkatan ketiga indikator tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia (Sulistio, 2011).



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

**Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021-2024 di Wilayah *Hinterland* IKN**

Gambar 1.2 menunjukkan data Indeks Pembangunan Manusia di wilayah *Hinterland* IKN mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan kesenjangan pembangunan yang jelas antara perkotaan dan kabupaten selama periode 2021-2024. Kota Samarinda dan Balikpapan dengan persentase IPM yang tinggi, Kota Samarinda mencatat peningkatan konsisten dari 80,76 pada tahun 2021 menjadi 82,24 pada tahun 2024, sementara Kota Balikpapan berkembang dari 80,71 pada tahun 2021 menjadi 82,24 pada tahun 2024, dengan data tersebut menunjukkan adanya kesetaraan IPM di kedua kota pada tahun 2024. Sedangkan, Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dari 74,06 pada tahun 2021 menjadi 75,91 pada tahun 2024 dan Kabupaten Penajam Paser Utara dari 72,01 pada tahun 2021 menjadi 73,90 pada tahun 2024. Meski terdapat perbedaan yang signifikan, keempat wilayah tersebut menunjukkan peningkatan IPM setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya pembangunan berkelanjutan di seluruh kawasan.

Tingginya kualitas sumber daya manusia akan menunjukkan kondisi pembangunan manusia yang terealisasi dengan baik. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi juga merupakan komponen menjanjikan yang dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan hasil dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa kualitas dan mutu kehidupan sumber daya manusia yang ada juga semakin tinggi (Arofah & Sishadiyati, 2022). Data IPM yang tinggi di wilayah *Hinterland* IKN menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun ke tahun, namun adanya kesenjangan yang jelas antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Kesenjangan tersebut mencerminkan perbedaan kualitas pembangunan manusia yang dapat menjadi kunci pemahaman tingkat kemiskinan di kabupaten masih relatif lebih tinggi.

Perencanaan pemerintah yang matang dalam pembangunan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang akan menghasilkan peningkatan kegiatan produksi dan jasa, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi tanpa kesempatan kerja akan menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata, dapat menyebabkan kemiskinan (Amran & Parinduri, 2024).

Laju penurunan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Salah satu perkembangan utama dalam memilih strategi pembangunan adalah efektivitas dalam menurunkan tingkat



penduduk miskin. Standar hidup yang rendah juga disebut sebagai ukuran kemiskinan, yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada seseorang atau kelompok orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum di masyarakat yang bersangkutan, seperti standar kesehatan, moral, dan materi. Dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti kemiskinan rendah (Nabawi, 2020).

Jumlah penduduk di wilayah *Hinterland* IKN pada rentang waktu 2021-2024 selalu meningkat. Peningkatan signifikan terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2021 jumlah penduduk mencapai 180,7 ribu jiwa dan pada tahun 2024 yaitu 267,7 ribu jiwa. Kabupaten dan kota lainnya yang ada di wilayah *Hinterland* IKN juga meningkat setiap tahunnya. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, pemerintah yang ada di wilayah *Hinterland* IKN harus memiliki strategi yang konsisten yang mengikuti perkembangan setiap tahun dan menetapkan target jangka menengah untuk mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan.

Banyak penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan oleh peneliti lain. Namun kebanyakan penelitian terdahulu fokus pada analisis di tingkat nasional atau regional yang lebih luas. Penelitian tentang kemiskinan dan juga Indeks Pembangunan Manusia di wilayah *Hinterland* IKN masih terbatas, sementara karakteristik unik wilayah *Hinterland* IKN sebagai kawasan yang sedang mengalami transformasi pembangunan memerlukan kajian tersendiri. Sehingga penelitian ini menjadi penting untuk merumuskan strategi pemahaman yang efektif dalam mengoptimalkan manfaat pembangunan IKN untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Penelitian dengan menggunakan *Simultaneous Equations*

*Models* pada variabel tingkat kemiskinan dan IPM masih jarang dilakukan, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tingkat Kemiskinan dan IPM di wilayah *Hinterland* IKN Tahun 2014-2024**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditarik rumusan masalah untuk menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan dengan IPM sebagai Variabel *Intervening* di wilayah *Hinterland* IKN sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, belanja modal dan tingkat kemiskinan secara parsial terhadap IPM?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, belanja modal dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama terhadap IPM?
3. Bagaimana pengaruh UMR, PMDN, dan IPM secara parsial terhadap tingkat kemiskinan?
4. Bagaimana pengaruh UMR, PMDN, dan IPM secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk, belanja modal, dan tingkat kemiskinan secara parsial terhadap IPM
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk, belanja modal, dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama terhadap IPM

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh UMR, PMDN, dan IPM secara parsial terhadap tingkat kemiskinan
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh UMR, PMDN, dan IPM secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu (Kontribusi Ilmiah)**

Kebaharuan penelitian ini adalah penggunaan model penelitian panel simultan dengan E-Views terhadap topik yang diteliti dan dua variabel dependen dalam satu model. Penggunaan model penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dan variabel independen saling mempengaruhi secara timbal balik dalam satu periode yang sama. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan dalam perencanaan pembangunan di wilayah *Hinterland* IKN, serta membantu merumuskan strategi efektif untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah *Hinterland* IKN yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pengambilan data dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak keluarnya Surat Keputusan bimbingan, yang diawali dengan pengajuan judul, dilanjutkan dengan konsultasi dan proses bimbingan. Berikut matriks jadwal penelitian ini:

**Tabel 1. 1 Matriks jadwal pelaksanaan penelitian**

[illegible]